

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan suatu bangsa. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat menyiapkan warga negara untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaan menghasilkan generasi yang diharapkan. Demikian pula dengan pendidikan di negeri ini. Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang, terutama dalam menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecanggihan teknologi dan komunikasi. Maka, perbaikan sumber daya manusia menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia terus diupayakan melalui proses pendidikan.

Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul dan dapat diharapkan, proses pendidikan juga senantiasa harus dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah adanya peran dinas pendidikan dalam mengatasi segera kisruh permasalahan yang muncul di dunia pendidikan khususnya di kota Yogyakarta. Gagasan ini muncul karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Sudiarja, dkk

(2006: 227) menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia telah gagal dalam membentuk karakter calon generasi penerusnya. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya para lulusan sekolah dan sarjana yang cerdas secara intelektual, namun tidak bermental tangguh dan berperilaku tidak sesuai dengan tujuan mulia pendidikan salah satunya adalah maraknya budaya tawuran antar pelajar khususnya di kota Yogyakarta.

Taufik Rahman (2013) melalui Republika.co.id menjelaskan jika adanya peningkatan tawuran antar pelajar dari Tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada artikel tersebut Taufik Rahman (2013) menuliskan jika:

“Kasus kekerasan yang melibatkan pelajar pada 2011 tercatat sembilan kasus dan sudah ada tiga kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dan enam kasus lainnya berakhir damai. Sedangkan pada 2012 tercatat sebanyak lima kasus dengan dua kasus dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan sisanya berakhir damai. Sementara itu, lima kasus kekerasan yang melibatkan pelajar sepanjang 2013 hingga Mei terjadi di lima kecamatan di Kota Yogyakarta”.

Berdasarkan temuan Republika.co.id dapat dirangkum peningkatan jumlah tawuran melalui tabel berikut.

Tabel 1.1.
Kasus Tawuran Antar Pelajar di Kota Yogyakarta

Tahun	Kasus	Penyelesaian Kasus	
		Dilimpahkan Ke Kejaksaan	Damai
2011	9	3	6
2012	5	2	3
2013	5	5	-

Sumber: Republika.co.id, Tahun 2013

Selain itu, pada tahun 2012 Komnas Perlindungan Anak (KPAI) merilis laporan hasil monitoring kekerasan yang terjadi pada anak menunjukkan jumlah tawuran pelajar tahun ini sebanyak 339 kasus dan memakan korban jiwa 82 orang. Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar-pelajar sebanyak 128

kasus. Data Komnas PA merilis jumlah tawuran pelajar tahun 2012 sebanyak 339 kasus dan memakan korban jiwa 82 orang. Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar pelajar sebanyak 128 kasus. Tak berbeda jauh, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, pengaduan kekerasan kepada anak sebanyak 107 kasus, dengan bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, dan penganiayaan. Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran antar-pelajar terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, pertandingan sepak bola, saling ejek di Facebook, yang kemudian sampai menyebabkan nyawa seorang pelajar melayang. Catatan tersebut seolah menampar wajah pendidikan kita, dimana pendidikan dianggap tidak mampu membimbing dan mengarahkan, serta mencetak peserta didik yang unggul dalam pengetahuan dan baik dalam perilaku serta akhlak.

Berikut disajikan data konflik antar pelajar selama kurun waktu tahun 2013-2016 di Yogyakarta :

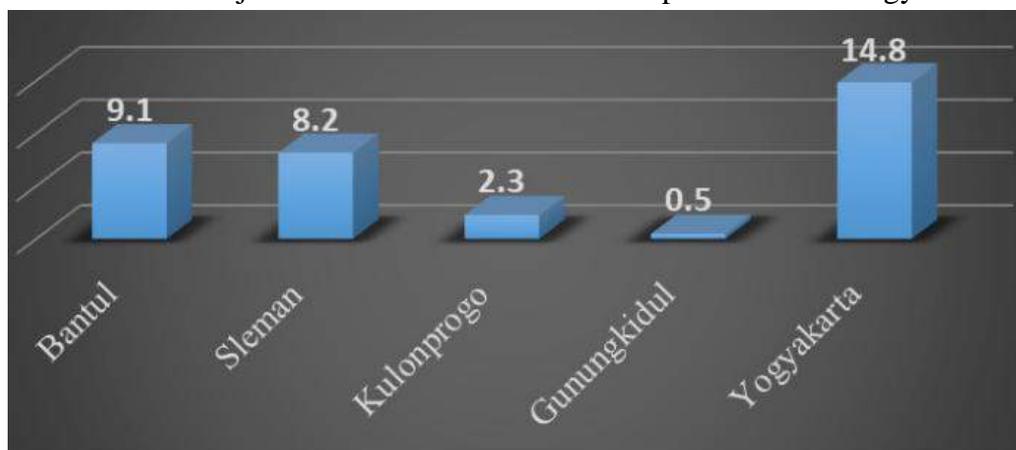
Gambar 1.1 Presentase Tawuran antar Pelajar di Yogyakarta Tahun 2013-2016



Sumber : PSKK UGM Tahun 2013-2016 dalam (Darwin, 2016)

Data di atas memberikan keterangan bahwa presentasi tawuran antar pelajar di wilayah Yogyakarta 66%, hal ini membuktikan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta rawan akan kekerasan antar pelajar. 66% peningkatan angka tawuran yang terjadi di Yogyakarta terbagi kedalam empat Kabupaten dan 1 Kota yakni dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.2. Keberadaan Sekolah yang Siswanya Sering Melakukan Tawuran Pelajar Berdasarkan Presentase Kabupaten/Kota di Yogyakarta



Sumber : PSKK UGM Tahun 2016 dalam (Darwin, 2016)

Di ketahui bahwa tindakan tawuran antar pelajar umumnya terjadi di wilayah perkotaan atau semiperkotaan, sedangkan wilayah yang mayoritas pedesaan, seperti Gunungkidul dan Kulonprogo mempunyai presentase yang kecil. Diantaranya 14,8 persen tawuran antar pelajar terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, kemudian 9,1 persen untuk Wilayah Kabupaten Bantul, 8,2 persen untuk Wilayah Kabupaten Sleman, 2,3 persen Wilayah Kabupaten Kulonprogo dan 0,5 persen untuk Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering dan biasa atau lumrah terjadi di Indonesia, bahkan tawuran sudah seperti menjadi kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar

sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah dari pada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar. Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada sekolah tersebut, sehingga ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar. KBBI (2012) mengartikan tawuran adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok.

KBBI juga menjelaskan jika tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat khususnya di kalangan pelajar, demikian pula halnya dengan kondisi pergaulan dikalangan Pelajar SMA Khususnya di Yogyakarta secara tidak langsung menjadi Terakulturasi, salah satu contoh kongkrit adalah dengan situs Jejaring atau pertemanan Facebook, twitter dan lain-lain yang sangat memudahkan mengenal teman baru. Idealnya teknologi tersebut mendatangkan pengaruh

positif tetapi tidak jarang pengaruh tadi berdampak negatif bagi pelajar itu sendiri, contohnya tindakan mengolok-olok baik pribadi maupun kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, dan korban jiwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak dan tanggung jawab pelajar yang mayoritas usia mereka masih tergolong anak-anak.

Pada penelitian ini akan mengulas peran Dinas Pendidikan DIY dalam mengatasi konflik antar sekolah yaitu tawuran khususnya di SMA Muh. 3 dan SMA Muh. 7 Yogyakarta. Tawuran pada kedua sekolah tersebut menjadi menarik karena konflik tersebut turun temurun dan antar generasi meskipun tidak diwariskan secara khusus antara alumni dengan siswa yang masih tercatat aktif ada di sekolah tersebut. Selain itu, menarik bagi peneliti karena konflik tersebut terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah saja tapi dimanapun tempatnya berada ketika siswa SMA Muh. 3 dan SMA Muh. 7 Yogyakarta bertemu konflik tersebut dapat dipicu oleh hal-hal sepele seperti perbedaan dukungan supporter bola, pada saat kompetisi basket antar sekolah, dan bahkan ketika bertemu di jalan tanpa ada pemicu yang pasti dapat menyulut konflik kedua sekolah tersebut.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ariefa Efianingrum (2016) di SMAN 10 dan SMA Gadjah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan jika realitas kekerasan pelajar SMA memiliki keterkaitan dengan habitus pelajar pada jenjang sekolah sebelumnya (SMP), sekolah lama (jika pelajar pindahan), dan habitus yang dibawa dari lingkungan

keluarga serta pergaulan dengan peer groupnya. Realitas kekerasan pelajar dengan demikian merupakan representasi kekerasan yang terjadi pada lingkungan lain. Dengan kata lain, kekerasan yang hadir dalam praktik sosial kehidupan masyarakat menjalar hingga ke dalam praktik pendidikan di sekolah. Realitas kekerasan pelajar yang hadir dalam arena persekolahan juga merupakan ekspresi kepemilikan modal kultural (cultural capital) berupa nilai-nilai kekerasan yang dihayati dan terinternalisasi dalam diri pelajar. Pelajar pelaku kekerasan mengembangkan strategi distingsi untuk membedakan identitas mereka dengan kelompok lain, misalnya melalui penampilan dan keberanian. Dalam konteks relasi kuasa, pelajar sesungguhnya tidak hanya berelasi dengan pihak sekolah atau dengan orang tua mereka, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesama pelajar. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika kekerasan pelajar, maka dapat ditentukan strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kembali kekerasan pelajar.

Atas dasar muncul dan maraknya budaya tawuran tersebut, tentunya kondisi ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi guru dan orangtua, akan tetapi pentingnya keterlibatan peran dinas pendidikan kota Yogyakarta supaya budaya itu dapat dihilangkan dari waktu ke waktu. Dwiki Prastianto (2013: 3) menjelaskan jika pada Tahun 2008, Kota Yogyakarta mengeluarkan SK Dinas Pendidikan Yogyakarta No. 188/147/2008 mengenai penyusunan tata tertib sekolah yang salah satu isinya membahas tentang model pakaian sekolah dan atributnya. Sebuah kebijakan publik yang menggunakan pendekatan top-

down untuk mengatasi tawuran pelajar, meletakkan wewenang pembuatan keputusan berada ditangan pihak yang memiliki otoritas, yaitu elit Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kepala Sekolah dan jajarannya ditempatkan sebagai aktor implementasi untuk mengatur para pelajar. Sedangkan, pelaksanaan program terletak pada peraturan sekolah yang mengharuskan para pelajar untuk mengganti badge sekolah yang semula menunjukkan identitas sekolah masing-masing, menjadi badge sekolah yang memiliki identitas bersama Pelajar Kota Yogyakarta.

Kebijakan publik yang tujuan akhirnya adalah penyeragaman atribut sekolah dimungkinkan sesuai untuk kondisi kota tertentu, dalam mengatasi tawuran pelajar. Sebab menurut Dwiki Prastianto (2013: 3) tawuran antar pelajar terjadi disebabkan adanya permasalahan identitas yang membentuk sebuah basis geng pelajar. Dwiki Prastianto (2013: 3) memaknai geng pelajar sebagai sebuah komunitas informal yang terdapat didalam sebuah sekolah tertentu, di luar organisasi formal yang diakui oleh sekolah. Geng pelajar memiliki beberapa sifat yang cukup mirip dengan geng dalam kelompok sosial yang lebih besar.

Pentingnya peran Dinas Pendidikan kota Yogyakarta ikut serta dalam mengatasi tawuran antar pelajar tersebut supaya citra baik kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dapat terselamatkan dan mampu menunjukkan bahwa sebagai kota Pelajar tentunya siapapun yang belajar di kota *Gudheg* ini adalah untuk menimba ilmu bukan untuk menciptakan kerusuhan yang dapat berdampak negatif buat diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu,

peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016?
2. Apakah kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016?
2. Kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Sosial

dan Politik, khususnya mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, dan sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ariefa Efianingrum (2016) di SMAN 10 dan SMA Gajah Mada Yogyakarta. Hasil penelitian menemukan jika realitas kekerasan pelajar SMA memiliki keterkaitan dengan habitus pelajar pada jenjang sekolah sebelumnya (SMP), sekolah lama (jika pelajar pindahan), dan habitus yang dibawa dari lingkungan keluarga serta pergaulan dengan peer groupnya. Realitas kekerasan pelajar dengan demikian merupakan representasi kekerasan yang terjadi pada lingkungan lain. Dengan kata lain, kekerasan yang hadir dalam praktik sosial kehidupan masyarakat menjalar hingga ke dalam praktik pendidikan di sekolah. Realitas kekerasan pelajar yang hadir dalam arena persekolahan juga merupakan ekspresi kepemilikan modal kultural (cultural capital) berupa nilai-nilai kekerasan yang dihayati dan terinternalisasi dalam diri pelajar. Pelajar pelaku kekerasan mengembangkan strategi distingsi untuk membedakan identitas mereka

dengan kelompok lain, misalnya melalui penampilan dan keberanian. Dalam konteks relasi kuasa, pelajar sesungguhnya tidak hanya berelasi dengan pihak sekolah atau dengan orang tua mereka, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesama pelajar. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika kekerasan pelajar, maka dapat ditentukan strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kembali kekerasan pelajar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Puspa Arika Sari (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) alasan siswa melakukan perkelahian antar pelajar adalah (a) Terhadap sekolah lawan merupakan musuh bebuyutan sejak dahulu (b) Sebagai bentuk solidaritas kepada teman. (2) Perkelahian antar pelajar yang terjadi di SMA N 8 Surakarta telah mengalami penurunan sejak 2015 lalu hingga saat ini tidak lagi terjadi. (3) Peran sekolah dalam menyikapi perkelahian yang dilakukan oleh pelajar sekolahnya adalah dengan memperketat pelaksanaan dan pengawasan peraturan.
3. Dewi Nur Setyaningrum (2012) dengan judul “Peranan sekolah dalam upaya mengatasi perilaku Juvenile Delinquency di lingkungan sekolah SMK MPU Tantular, Buntu Banyumas”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku siswa yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang berupa tidak mematuhi tata tertib yang ada disekolah seperti membolos, merokok dilingkungan sekolah, tidak memakai seragam sesuai aturan, terlambat masuk sekolah dan masuk jam

pelajaran. Peranan sekolah dalam menangani kenakalan remaja yang dilakukan tindakan preventif berupa sosialisasi melalui tatatertib, himbauan pada saat KBM dan upacara, menjalin komunikasi dengan orang tua wali, melalui pertemuan wali murid pada setiap semester serta penambahan jam ekstrakurikuler. Adanya tindakan kuratif yang memberikan pembinaan dan bimbingan berkelanjutan serta pemantauan terhadap anak tersebut, serta melakukan pemanggilan kepada orang tua wali. Tindakan represif yang dilakukan kepada anak yang melanggar berupa hukuman yang bersifat mendidik yang dapat memberikan efek jera. Kendala yang dihadapi adalah sosialisasi yang belum optimal, sulitnya mempertemukan pihak sekolah dengan orang tua wali, ketidakaktifan siswa dalam ekstrakurikuler, sikap kurang terbukanya siswa, ketidak tegasan peraturan yang memberi celah siswa untuk melakukan pelanggaran. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peranan sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja disekolah. Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada peran dan kendala sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja, sedangkan peneliti Peran Dinas Pendidikan dalam mengatasi kenakalan remaja, dan berbeda pada setting tempat penelitiannya.

4. Ahmad Dahlan (2008) dengan judul “usaha sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa”. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan bentuk – bentuk kenakalan yang dilakukan oleh siswa meliputi terlambat masuk sekolah, membolo sekolah, memakai seragam tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, membuat kegaduhan di kelas ketika pelajaran

sedang berlangsung, merokok dilingkungan sekolah, memeras atau meminta uang kepada teman sekolah, mencuri dan berkelahi. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah faktor psikologis anak, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah dan pengaruh sosio kultural. Usaha yang dilakukan oleh pihak MTS Negeri Sumberagung Kabupaten Bantul dalam mengatasi kenakalan siswa diantaranya dengan melakukan tindakan preventif, tindakan represif, dan kuratif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengatasi kenakalan remaja. Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada peran dinas dalam mengatasi kenakalan remaja.

5. Ike Wulandari (2014) dengan judul “Kebijakan Sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja di SMA Negeri Yogyakarta”. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah dalam rangka mengatasi kenakalan remajadi bagi menjadi 3 upaya yaitu kuratif, represif dan preventif. Program yang dibuat sekolah dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain: pemberian peringatan, dan nasehat, adanya sanksi yang mendidik, adanya kegiatan instruksi mendadak, pembentukan tim tata tertib dan sanksi lainnya. SMA Negeri 6 Yogyakarta telah berhasil mengatasi kenakalan remaja khususnya tawurandan demo siswa, namun kini masih terdapat bentuk – bentuk kenakalan remaja dalam kategori sedang mendekati ringan antara lain vandalisme, nglitih, berpakaian tidak sesuai dengan peraturan , rambut gondrong (bagi siswa

laki –laki) bermain hp saat pelajaran berlangsung dan membuang sampah sembarangan. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja tingkat Sekolah Menengah Atas. Perbedaannya adalah peneliti berfokus pada peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi kenakalan remaja, sedangkan peneliti Peran Sekolah dalam mengatasi kenakalan remaja.

F. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian Peran

Bryant dan White dalam Amira (2012: 9) menyatakan bahwa peran didefinisikan sebagai suatu deskripsi “pekerjaan untuk seseorang atau individu yang mengandung harapan-harapan tertentu yang tidak mempedulikan siapa yang menduduki suatu posisi tersebut”. Definisi tersebut dapat menjelaskan bahwa peran merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang di dalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.

Peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya (Soekanto, 2006: 212). Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat menyesuaikan

perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Dari beberapa konsep di atas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dari pengertian tersebut bila dikaitkan dengan peran dinas Pendidikan, maka definisi peran adalah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas – tugas Negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah di kota Yogyakarta dalam hal ini adalah peran Dinas Pendidikan mengatasi tawuran antar pelajar di kota Yogyakarta.

b. Peran Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Pemerintah

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah diatur mengenai dinas daerah yaitu:

- 1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dinas-dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung dan rugi, tetapi dalam batas – batas tertentu dapat didayagunakan sebagai organisasi yang memberikan pelayanan yang berorientasi pada pengembangan daerah. Menurut Sihombing (2001: 172) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Sebagai Fasilitator

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

2) Sebagai Pelayan Masyarakat

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat

tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

3) Sebagai Pendamping

Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka mampu menampilkan ing madya mangun karsa (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (Ing ngarsa sung tulodo).

4) Sebagai Mitra

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal,

sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

5) Sebagai Penyandang Dana

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

2. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soerjono Soekanto, 2006: 91). Istilah *conflict* dalam bahasa latinnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antar beberapa pihak (Pruit dan Rubin, 2009: 9). Novri Susan (2009: 4)

menjelaskan jika konflik berarti pertentangan atau percekocan. Pertentangan sendiri muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak berseberangan.

Pruitt dan Rubin (2009: 9) mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepadam. Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkannya, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya.

Pengertian konflik diatas dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu keadaan dari akibat adanya pertentangan antara kehendak, nilai atau tujuan yang ingin dicapai yang menyebabkan suatu kondisi tidak nyaman baik didalam diri individu maupun antar kelompok. Pada konflik dalam penelitian ini terjadi konflik antar kelompok dengan kelompok yaitu antara pelajar yang disebut sebagai tawuran.

b. Faktor – Faktor Penyebab Konflik pada Remaja

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2006: 23), dalam kehidupan manusia ada dua jenis belajar yaitu belajar secara fisik dan belajar psikis. Belajar sosial termasuk dalam belajar psikis dimana seseorang mempelajari perannya dan peran orang lain. Selanjutnya orang tersebut akan menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan peran sosial yang

telah dipelajari itu. Cara yang sangat penting dalam belajar sosial adalah tingkah laku tiruan (*imitation*).

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (2006: 35), terdapat tiga mekanisme tiruan, yaitu:

- 1) Tingkah laku sama (*same behavior*), yakni apabila dua orang mempunyai respon yang sama terhadap stimulus atau isyarat yang sama.
- 2) Tingkah laku tergantung (*matched dependent behavior*), yakni salah satu pihak akan menyesuaikan tingkah lakunya (*match*) dan akan tergantung (*dependent*) kepada pihak lain yang dianggap lebih pintar, lebih tua, atau lebih mampu.
- 3) Tingkah laku salinan (*Copying*) yakni si peniru bertingkah laku atas dasar tingkah laku modelnya.

Sugihartono (2007: 101) mengemukakan bahwa tingkah laku tiruan merupakan suatu bentuk asosiasi suatu rangsang dengan rangsang lain. Si peniru akan melakukan tingkah laku yang sama dengan tingkah laku model. Sesuai dengan social learning theory ini, seseorang seringkali terdorong untuk mencontoh perilaku orang lain. Pencontohan perilaku (*modelling*) ini berlaku untuk perilaku yang baik maupun yang tidak baik.

Seorang remaja yang melihat suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa dapat mencontoh tindakan tersebut untuk kemudian mempraktekkannya dalam bentuk tindakan kekerasan baik

terhadap teman sebaya maupun lingkungan sekitarnya. Contoh lain dari pandangan *social learning theory* ini adalah tentang kemungkinan adanya pengaruh dari media massa, seperti televisi. Tayangan kekerasan yang terdapat pada tayangan televisi atau film dapat berpengaruh negatif terhadap remaja.

Bunyamin Maftuh (2005: 83) yang mengembangkan *social identity theory* menggambarkan perilaku individu di dalam dan antar kelompok dapat dijelaskan berdasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial tertentu dan proses identifikasi di dalam kelompoknya.

Hogg & Abrams mengklaim bahwa identitas kelompok sosial mempengaruhi identitas diri dan konsep diri individu. Berdasarkan teori ini dapat kita ketahui bahwa pelajar yang terlibat konflik antarkelompok seperti tawuran dikarenakan mereka ingin mengidentifikasi diri mereka dan kelompok mereka, mereka bertujuan untuk melindungi nama baik dirinya dan nama baik kelompoknya. Teori peningkatan reputasi (*reputation enhancement theory*) yang dikembangkan oleh Emler dan Reicher (Bunyamin Maftuh, 2005: 84) menjelaskan perilaku individu dalam hubungan dengan individu lain dalam satu kelompok, dimana tiap individu berusaha untuk mempunyai reputasi yang baik di hadapan teman-teman kelompoknya.

Jadi menurut teori ini, keterlibatan pelajar dalam setiap aksi konflik merupakan salah satu upaya mereka untuk berusaha mendapatkan reputasi baik di mata teman-teman satu kelompoknya. Dari berbagai

macam teori tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa sumber atau penyebab konflik pada pelajar sangat bervariasi. Satu macam konflik mungkin saja berawal dari sumber yang berbeda, sehingga metode penanganan yang diberikan juga berbeda.

c. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab atau akar-akar pertentangan atau konflik menurut Soerjono Soekanto (2006: 91-92), antara lain:

1) Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

2) Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3) Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4) Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang

dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

d. Akibat Terjadinya Konflik

Ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya pertentangan menurut Soerjono Soekanto (2006: 95-96), adalah:

- 1) Bertambahnya solidaritas in-group Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, maka solidaritas dalam kelompok tersebut akan bertambah erat.
- 2) Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok Pecahnya persatuan dalam kelompok apabila pertentangan dalam satu kelompok itu terjadi.
- 3) Perubahan kepribadian para individu
- 4) Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia
- 5) Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

e. Cara Penyelesaian Konflik

Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan konflik Soerjono Soekanto (2006: 77-78), yaitu:

1) *Coercion* (Paksaan)

Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. *Coercion* merupakan suatu cara dimana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

2) *Compromise*

Suatu cara dimana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan, agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada.

3) *Arbitration*

Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat.

4) *Mediation* (Penengahan)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu.

5) *Conciliation*

Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama.

f. Resolusi Konflik

Resolusi menurut Levine (1998: 3) adalah tindakan mengurai suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan. Sedangkan Morton & Coleman (2000: 197) mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).

Fisher et al (2001: 7) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru. Menurut Mindes (2006: 24) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

3. Tawuran Pelajar

a. Pengertian Tawuran Pelajar

Dalam kamus bahasa Indonesia *tawuran* dapat diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan *pelajar* adalah adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang

yang masih dalam proses belajar. Ada juga yang mengartikan Tawuran atau Tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok.

b. Macam – macam Tawuran

KBBI (2012) menjelaskan macam-macam tawuran sebagai berikut:

1) Tawuran di tingkat sekolah

Tawuran paling banyak diartikan sebagai perkelahian massal antara dua kubu siswa suatu sekolah yang sering diakibatkan oleh hal-hal sepele, mulai dari saling mengejek, dan sampai tawuran karena salah satu sekolah memang ingin mengajak tawuran sekolah lain karena hanya ingin bersenang-senang.

2) Tawuran di tingkat fakultas

Tawuran di tingkat fakultas (kampus) biasanya dilakukan antar mahasiswa kampus itu sendiri, namun berbeda fakultas. Misalnya mahasiswa fakultas satu mempunyai masalah dengan fakultas lain; maka tawuran biasanya akan terjadi di dalam area universitas/kampus. Sebab tawuran di tingkat fakultas biasanya hampir sama dengan sebab tawuran di tingkat sekolah, namun sudah mencapai tingkat kekerasan yang lebih serius.

3) Tawuran antar warga

Tawuran antar warga masyarakat biasanya dimulai dengan hal-hal sepele, dan juga karena memang kedua kubu masyarakat sudah menjadi saingan sejak awal.

c. Faktor – faktor Penyebab Tawuran

KBBI (2012) menjelaskan faktor penyebab tawuran antar pelajar menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah faktor yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi milieu di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar. Perilaku merupakan reaksi ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dalam pandangan psikologis, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu (internal), yang sering disebut dengan kepribadian, walau tidak selalu tepat. Sedangkan kondisi di luar (eksternal) adalah factor yang terjadi pada diri individu itu sendiri.

1) Faktor internal

Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks disini berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan banyak. Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Tapi pada remaja yang terlibat tawuran, mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan

situasi itu untuk pengembangan dirinya. Mereka biasanya putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, menyalahkan orang lain/pihak lain pada setiap masalahnya, dan memilih menggunakan cara singkat untuk memecahkan masalah.

Pada remaja yang sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami konflik batin, mudah frustrasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan. Faktor internal ini terjadi didalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan disekitarnya dan semua pengaruh yang datang dari luar.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor keluarga

Baik buruknya rumah tangga atau berantakan dan tidaknya sebuah rumah tangga perlindungan lebih yang diberikan orang tua. penolakan orang tua, ada pasangan suami istri yang tidak pernah bisa memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu, pengaruh buruk dari orang tua, tingkah laku kriminal dan tindakan asusila.

b) Faktor lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah yang tidak menguntungkan bisa berupa bangunan sekolah yang tidak memenuhi persyaratan, tanpa halaman bermain yang cukup luas, tanpa ruangan olah raga,

minimnya fasilitas ruang belajar, jumlah murid di dalam kelas yang terlalu banyak dan padat, ventilasi dan sanitasi yang buruk dan lain sebagainya.

- c) Lingkungan-lingkungan sekitar yang tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan remaja.

d. Dampak Karena Tawuran Pelajar

KBBI (2012) menjelaskan dampak tawuran antar pelajar sebagai berikut:

- a. Kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban. Baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian.
- b. Masyarakat sekitar juga dirugikan.
- c. Terganggunya proses belajar mengajar.
- d. Menurunnya moralitas para pelajar.
- e. Hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai.
- f. Rusaknya sarana prasarana umum, seperti bus, halte dan fasilitas lainnya. Serta fasilitas pribadi seperti kendaraan sendiri.

4. Pelajar

Pelajar atau siswa dalam sistem pendidikan merupakan komponen input yang harus dikelola secara efektif dan efisien agar menjadi output yang berkualitas. Sebagai input pendidikan pelajar sesungguhnya merupakan subjek yang harus melakukan proses pembelajaran (Jamal, 2016: 55). Pelajar sendiri adalah siswa yang masih sekolah di suatu instansi

pendidikan baik itu negeri maupun swasta, baik tingkat SD, SMP ataupun SMA/SMK yang memiliki bakat serta kreatifitas dalam belajar baik formal maupun informal.

Pelajar merupakan aset yang penting bagi suatu bangsa, generasi pelajar merupakan bibit-bibit yang harus dikembangkan untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam memajukan nusa dan bangsa dan penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa dimasa depan yang akan membangun sebuah bangsa dengan lebih baik serta mempertahankan kedaulatan bangsa, tak hanya itu dengan adanya pelajar maka pergaulan sosial juga semakin baik karna di pelajar diajari tentang norma-norma serta dibekali akhlak yang baik seperti contohnya selalu bertegur sapa maupun menghormati yang lebih tua atau sebagainya. Pelajar tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan (Jamal, 2016: 56).

Siswa atau peserta didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri. Seorang pelajar yang baik seharusnya mampu menempatkan diri dengan baik pula di kalangan masyarakat karena sebagai seorang peserta didik, secara tidak langsung pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki juga lebih baik dibandingkan yang lain. Hal ini menuntut agar

pelajar berperilaku sopan agar dapat ditiru oleh masyarakat lain yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah (Jamal, 2016: 57).

Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, sedangkan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pelajar SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti tawuran, narkoba, kriminal

dan kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

5. Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat menjadi tolak ukur suatu Negara maju atau berkembang. Pemerintah mencanangkan program untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Negara Indonesia. Pendidikan berfungsi mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermatahat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Dalam penyelenggaraanya, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia dan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, pendidikan nasional dilaksanakan oleh suatu Dinas Pendidikan.

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan dasar, menengah kejuruan, pendidikan non formal serta pembinaan pemuda dan olahraga. Salah satu pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan tersebut adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaanya mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan, sesuai dengan PERDA No. 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

Selain itu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta membantu dan berperan serta dalam merealisasikan program kerja di bidang pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan juga sekolah – sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Yogyakarta. Jika dikaitkan dalam penelitian ini salah satu acara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia adalah dengan cara meminimalisir tawuran antar pelajar dan mengembalikan pelajar kembali kepada tujuannya yaitu belajar bukan menciptakan konflik atau kerusuhan.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan suatu pengertian yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual dimaksudkan guna menjadi gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan istilah yang ada dalam pokok permasalahan

1. Peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang.

2. Pemerintah Daerah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negaranya sendiri. Pemerintahan semata-mata tidak hanya sekedar menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga tugas – tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
3. Kenakalan Remaja adalah perubahan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma – norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan digunakan untuk mendeskripsikan hal-hal yang akan diteliti.

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016

Pada penelitian ini peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016 merujuk pada teori Sihombing (2001: 172) yaitu peran sebagai fasilitator, sebagai pelayan masyarakat, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Peran sebagai Fasilitator

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai fasilitator adalah mengupayakan suatu kondisi yang kondusif melalui upaya preventif dan kuratif.

b. Peran sebagai Pelayan Masyarakat

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat dilakukan dengan cara melakukan berbagai macam kegiatan yang melibatkan pihak sekolah untuk menggali bakat dan potensi generasi muda.

c. Peran sebagai Pendamping

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai pendamping dilakukan dengan cara mendampingi sekolah dalam berbagai program yang dicanangkan pihak sekolah.

d. Peran sebagai Mitra

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai mitra yaitu menjalin relasi dengan pihak ke tiga yang melibatkan sekolah.

e. Peran sebagai Penyandang Dana

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sebagai mitra yaitu memberikan subsidi dari pihak sekolah melalui APBD.

2. Kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam Mengatasi Konflik Antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016

Pada penelitian ini kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016 dilakukan penilaian dari pihak sekolah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2007: 150). Sedangkan Furchan (1992: 21-22) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, penulis dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016.

2. Unit Analisa

Unit Analisis merupakan satuan tertentu yang di perhitungkan sebagaiobyekpenelitian (Soehartono, 1995: 29). Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah Peran Dinas Pendidikan kota Yogyakarta dan Kepala Sekolah Menengah Atas Muhammdadiyah 3 dan Muhammdadiyah 7 di Yogyakarta.

3. Sumber Data

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data yang diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang berkaitan dengan peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016, antara lain :

a. Data Primer

“Data primer adalah suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut *first hand information*” (Silalahi, 2010: 289). Data primer ini diperoleh dari narasumber atau informan melalui wawancara yang memiliki informasi dan dapat dipercaya terkait dengan peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Sumber data primer atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Hal tersebut senada dengan pendapat Sutopo (2002: 36) “*purposive sampling* adalah pemilihan sampel diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.” Peneliti akan memilih informan (key informan) yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data karena mengetahui masalahnya secara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah anggota dinas Pendidikan sebanyak 1 orang

yaitu Drs. Warno Gumelar, M. Pd. Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 orang yaitu ibu Rr. Suhartati, SH. Kepala Sekolah SMA Muh. 3 Yogyakarta sebanyak 1 orang yaitu Drs. H. Herynugroho, M.Pd. Kepala Sekolah SMA Muh. 7 Yogyakarta sebanyak 1 orang yaitu Berkah Beno Widodo, S. Pd.

b. Data Sekunder

Data yang pengumpulannya diperoleh tidak diusahakan sendiri tetapi dari sumber lain selain data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder dapat diperoleh melalui undang-undang, dokumen, arsip-arsip, buku, buletin catatan statistik, media internet dan lain sebagainya yang mendukung peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Data sekunder berfungsi untuk melengkapi dalam menganalisa serta memperkuat kesimpulan dari hasil penelitian.

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Pendidikan Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat penelitian adalah sarana yang digunakan untuk melaksanakan atau memperlancar jalannya penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang valid maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Arikunto (2006: 232), mengatakan bahwa “mengumpulkan data adalah mengamati

variabel yang akan diteliti dengan metode observasi, dan dokumentasi”.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Interview atau wawancara

“Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” (Sugiyono, 2009: 317). Metode wawancara ini dimaksudkan untuk menggali data dan informasi-informasi mengenai peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Wawancara dilakukan kepada kepala atau anggota dinas Pendidikan sebanyak 1 orang dan kepala sekolah sebanyak 2 orang. Wawancara dilakukan selama \pm 1 minggu, hal ini dikarenakan kesulitan penulis dalam mengumpulkan informan penelitian dan kesulitan waktu penulis untuk bertemu dengan informan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Informan Penelitian

No	Informan	Jenis Kelamin	Posisi
1	Drs. Warno Gumelar, M. Pd.	Laki-laki	Anggota Dinas Pendidikan
2	Rr. Suhartati, SH.	Perempuan	Kepala Pendidikan Bagian Menengah
3	Drs. H. Herynugroho, M.Pd.	Laki-laki	Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
4	Berkah Beno Widodo, S. Pd.	Laki-laki	Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta

Sumber: Data Primer, 2018

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan dan tujuana penelitian. Menurut Sutopo (2002: 69), studi dokumentasi yaitu:

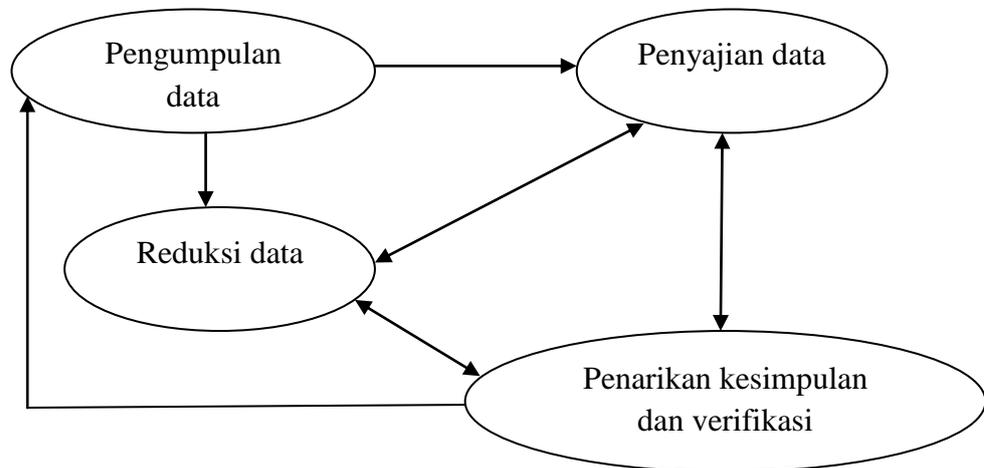
“studi dokumentasi ini merupakan bahan tertulis yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif yang mana mempunyai hubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu yang merupakan rekaman tertulis baik berupa gambar maupun benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu”.

Dokumen yang dimaksud adalah arsip, buku, benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti berdasarkan model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Sugiyono (2009: 246) analisis data pada model ini terdiri dari “empat komponen yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”. Keempat komponen itu merupakan siklus yang berlangsung secara terus menerus antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

“Proses siklusnya” dapat dilihat pada gambar berikut (Sugiyono, 2009: 246).



Gambar 1.3. Teknik Analisis Data

Sumber: Sugiyono (2009: 246)

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dikemukakan sistematika analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proses penelitian berlangsung dan berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Selain itu, reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Pada tahap reduksi penulis menganalisis hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan digunakan sebagai penyajian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam pengambilan data kecenderungan kognitif manusia menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam satuan yang mudah dipahami. Penyajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks, grafik atau bagian untuk menggabungkan informasi sehingga mencapai analisis kualitatif yang valid tentang peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang sudah dianalisis oleh penulis sebelumnya. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sudah dianalisis oleh peneliti disajikan pada bab 3 sebagai hasil penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

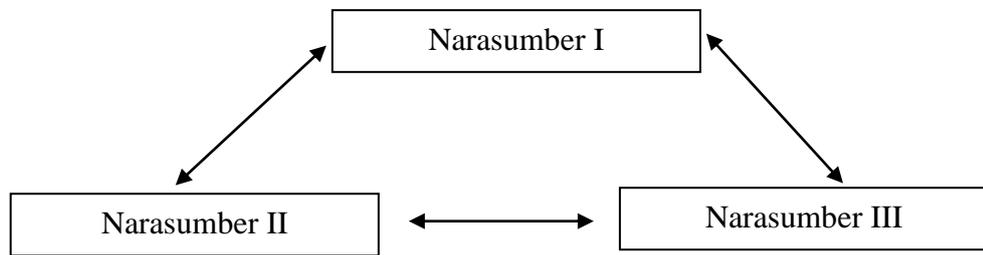
Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap paling akhir dalam analisa data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada rumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Pada penarikan kesimpulan, peneliti dari awal mengumpulkan data dan mencari arti data yang telah dikumpulkan, setelah data disajikan penelitian dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan

data dan mencari hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Data yang telah tersusun kemudian dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan yang bersifat sementara yang dapat berubah setelah ditemukan temuan pendukung dalam proses verifikasi data setelah peneliti kembali ke lapangan. Verifikasi dilakukan berdasarkan informasi dari informan penelitian.

7. Teknik Validitas Data

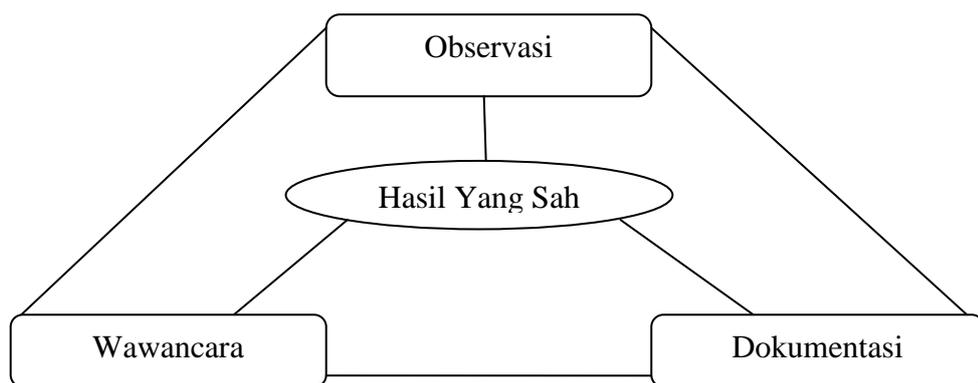
Teknik untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh, dilakukan dengan teknik triangulasi. Moleong (2006: 330) mengemukakan bahwa “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan metode. Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Berikut skema triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1.4. Triangulasi Sumber

Sumber: Sugiyono (2009: 22)

Sedangkan, pada triangulasi metode peneliti melakukan wawancara kepada informan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Setelah wawancara, observasi, dan dokumentasi dilakukan baru peneliti membuat kesimpulan yang akan digunakan sebagai pembahasan dalam penelitian. Berikut skema triangulasi metode yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1.5. Triangulasi Metode

Sumber: Moleong (2006)